

IMPLEMENTASI OTONOMI KHUSUS PAPUA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KERAKYATAN DI DISTRIK MERAUKE KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA

Kamilah Arikah Syahbana

NPP. 29.1777

Asdaf Kabupaten Merauke, Provinsi Papua

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: kamilaharikah23@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP). *This research is entitled Implementation of Special Autonomy for Papua in Improving the People's Economy in Merauke District, Merauke Regency, Papua Province. This study aims to determine the extent of implementation and the level of influence carried out in the implementation of Papua's special autonomy policy in improving the people's economy in Merauke District, Merauke Regency, Papua Province. Because in the implementation there are still problems and have not yet achieved the objectives of Otsus because there are still many people who have not felt the success of welfare in the field of education and all fields of development* **Purpose** Based on the implementation of the Special Autonomy for Papua as stipulated in Law No. 21 of 2001, it has given a significant role to the local government for the formulation of policies and development programs that favor the people.. **Method** To evaluate the program, researchers in conducting this research combine qualitative data and quantitative data so that the results are more accurate. This research will use interactive methods and data collection techniques through interviews, observation, documentation and questionnaires.. In conducting data analysis the author also uses validity and reliability trials using SPSS **Results** This study answers the evaluation with the observation that of the 4 variables that have been implemented well but still found some weaknesses from 1 variable, namely resources such as human resources and facilities that have not been fulfilled. Therefore, special autonomy is expected to be a new hope for Papua as a whole and especially in the district. Special autonomy requires a new approach that is more effective, productive and comprehensive to oversee its implementation. **Conclusion** based on the results of research conducted by researchers the implementation of special autonomy in improving the people,s economy in Merauke District has an influence in improving the welfare of indigenous.

Keywords: Implementation, Special Autonomy, People's Economy

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang Pelaksanaan otonomi khusus Papua yang sudah berjalan sejak tahun 2001 mempunyai dampak yang besar bagi Papua, akan tetapi pada realitanya masih ada Orang Asli Papua yang

hidupnya belum sejahtera walaupun telah diberikan bantuan dan fasilitas dalam kegiatan usaha sehingga ekonomi kerakyatan yang pada dasarnya sangat cocok untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua, khususnya pada usaha mikro. **Tujuan** penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaruh otonomi khusus terhadap ekonomi kerakyatan di Distrik Merauke Kabupaten Merauke dan juga mengetahui pelaksanaan otonomi khusus terhadap ekonomi kerakyatan di Distrik Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua. **Metode** penelitian yang digunakan adalah penelitian mix method yaitu terdapat data kualitatif dan kuantitatif sehingga data yang didapatkan lebih akurat. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi serta menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Untuk analisis data peneliti menggunakan penyajian data, penarikan kesimpulan serta menggunakan SPSS untuk keabsahan data yang ada. **Hasil/Temuan** penelitian ini mendapatkan hasil yaitu bahwa otonomi khusus mempunyai pengaruh terhadap ekonomi kerakyatan tetapi pengaruh tersebut tidak begitu besar dan otonomi khusus dalam pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan peraturan otonomi khusus yang ada akan tetapi terdapat kekurangan yaitu SDM dan fasilitas yang belum terpenuhi. Sehingga diharapkan pemerintah memberikan sebuah kebijakan atau alternative untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua agar seimbang dengan provinsi lain. **Kesimpulan** berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti implementasi otonomi khusus dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan di Distrik Merauke mempunyai pengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua, akan tetapi masih perlu diperhatikan SDM di Distrik Merauke.

Kata Kunci: Implementasi, Otonomi Khusus, Ekonomi Kerakyatan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan otonomi khusus Papua yang menjadi sasaran utama adalah Orang Asli Papua diharapkan dengan adanya otonomi khusus Papua masyarakat lebih sejahtera dan makmur dengan berkurangnya permasalahan yang terjadi dibidang ekonomi. Akan tetapi masih ada yang belum mendapatkan haknya untuk mempunyai hidup yang layak. Otonomi khusus menjadi salah satu harapan agar Orang Asli Papua mempunyai kehidupan yang layak. Akan tetapi pada realitanya masih banyak Orang Asli Papua yang belum merasakan dampak dalam pelaksanaan otonomi khusus. Adanya otonomi khusus Papua tidak terlepas dari ekonomi kerakyatan yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi Orang Asli Papua berdasarkan kebijakan Otonomi Khusus. Ekonomi Kerakyatan pada dasarnya merupakan sistem yang kekuatannya berdasarkan ekonomi rakyat yang dikelola sesuai dengan potensi rakyat berdasarkan sumberdaya yang ada di daerah dengan tidak harus mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan di Distrik Merauke maka pemerintah harus memperhatikan kegiatan usaha untuk kesejahteraan Orang Asli Papua. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti akan meneliti terkait kegiatan Usaha khususnya usaha mikro Orang Asli Papua di Kabupaten Merauke.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Implementasi otonomi khusus yang dalam pelaksanaannya yang utama adalah untuk kesejahteraan Orang Asli Papua, akan tetapi masih ada yang belum mendapatkan haknya dalam pelaksanaan otonomi khusus, untuk itu dalam hal ini peneliti mendata kegiatan usaha mikro Orang Asli Papua yang ada di Distrik Merauke dengan sampel 73 orang responden sebagai bahan untuk

menganalisis jawaban responden dan juga agar data yang didapat dari hasil wawancara lebih akurat.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian sebelumnya baik mengenai implementasi otonomi khusus untuk kegiatan usaha mikro Orang Asli Papua. Penelitian Altianua Umang, Indra Gunawan, dan Cahyo Sasmito berjudul Implementasi otonomi khusus Provinsi Papua dalam ketahanan wilayah NKRI di pemerintah Kabupaten Mimika: Studi kasus pada pengelolaan Dana Desa Distrik tahun 2016-2017) menemukan bahwa ketahanan NKRI merupakan salah satu hal yang harus dipertahankan dan sangat berpengaruh bagi pelaksanaan otonomi khusus dan juga wilayah NKRI merupakan wilayah Indonesia yang harus dijaga (Altianua Umang, Indra Gunawan dan Cahyo Sasmito, 2018). Penelitian Wiwie Iryanti, Pangkey, dan Londa berjudul Dampak otonomi khusus Papua terhadap kesejahteraan Masyarakat Asli Papua di Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika Provinsi Papua menemukan bahwa otonomi khusus mempunyai dampak yang besar bagi Orang Asli Papua jika dibandingkan dengan dulu sebelum adanya otonomi khusus. Penelitian ini menjawab sebagian Orang Asli Papua masih ada yang belum diperhatikan oleh pemerintah daerah (Wiwie Iryanti, Pangkey dan Londa, 2014). Penelitian Ariyanto yang berjudul Politik Hukum Ekonomi kerakyatan berbasis Orang Asli Papua dalam konsep otonomi khusus Papua menemukan bahwa dalam ekonomi kerakyatan merupakan prinsip yang sangat cocok untuk kesejahteraan Orang Asli Papua karena mengelola sumber daya yang ada di daerah setempat dan juga dalam hal ini terdapat politik hukum sehingga terdapat aturan (Ariyanto, 2017).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah mengenai implementasi otonomi khusus Papua dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan di Distrik Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua. Metode yang digunakan adalah mix method yaitu gabungan kualitatif dan kuantitatif sehingga kkuualitatif dengan pendekatan deduktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan kuesioner. Kuesioner digunakan agar responden dapat memberikan jawaban berdasarkan realita yang ada agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami permasalahan terkait implementasi otonomi khusus Papua dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan di Distrik Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua. Berdasarkan dua hal tersebut peneliti dapat menyimpulkan tentang implementasi otonomi khusus Papua dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan di Distrik Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode mix method yang menggabungkan antara data kualitatif dan kuantitatif. Menurut Sugiyono metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, tindakan dan produk tertentu sehingga dapat digunakan dalam memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Menurut Creswell metode campuran sekuensial (*Sequential mixed methods*) adalah suatu prosedur yang dilakukan oleh peneliti dalam menggabungkan data dari

satu metode dengan penemuan-penemuan dari metode yang lain. Teknik pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan Observasi, Wawancara, dokumentasi dan kuesioner. Dalam mengumpulkan data kualitatif penulis melakukan wawancara terhadap 6 orang yang dipilih dengan menggunakan *purposive sampling* yang terdiri dari 6 informan yaitu Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Merauke, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi UKM, dan juga Kepala Distrik Merauke. Dan untuk yang menjadi responden dalam kuesioner yaitu Orang Asli Papua yang menjadi pelaku usaha mikro di Distrik Merauke yang berjumlah 73 sampel. Adapun analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman (1992:16) sebagaimana dikutip Sugiyono (2015: 337) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas yang dilakukan melalui *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data) dan *Conclusion Drawing/Verifiacton* (Penarikan Kesimpulan).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis implemmentasi otonomi khusus Papua dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan di Distrik Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua. Peneliti menggunakan teori Edward III dalam menjawab pertanyaan kualitatif yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

3.1. Uji Validitas

3.1.1. Variabel X (Implementasi)

Tabel 'R' yang digunakan pada uji instrument (uji validitas untuk data yang berjumlah 9 pertanyaan, maka r tabel untuk 5% (0,05) adalah 0,2303.

Total Item Pearson Correlation

No item	R_ hitung	R_ tabel	Keterangan
X1	0,480	0,2303	Valid
X2	0,500	0,2303	Valid
X3	0,308	0,2303	Valid
X4	0,351	0,2303	Valid
X5	0,423	0,2303	Valid
X6	0,265	0,2303	Valid
X7	0,356	0,2303	Valid
X8	0,415	0,2303	Valid
X9	0,483	0,2303	Valid

Sumber: SPSS, 2022

3.1.2. Variabel Y

hasil validasi menunjukkan bahwa R hitung > R tabel. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Total Item Pearson Correlation

Item	R_hit	R_Tabel
Y_1	0,356	0,2303
Y_2	0,464	0,2303
Y_3	0,426	0,2303
Y_4	0,385	0,2303
Y_5	0,425	0,2303

Sumber: SPSS, 2022

3.2. Uji Reliabilitas

3.2.1 Variabel Y (Implementasi)

Pengujian reliabilitas terhadap hasil ukur item kuesioner dilakukan jika item-item yang terpilih lewat prosedur analisis item (uji validitas) telah dikompilasikan menjadi satu

Hasil Uji Reliabilitas Responden

Case Processing Summary		N	%
Cases	Valid	73	100.0
	Excluded	0	.0
	Total	73	100.0

Sumber : Diolah oleh penulis, 2022

3.2.1 Variabel Y (Ekonomi Kerakyatan)

Pada tabel Case Processing Summary dapat dilihat baris Cases Valid menyatakan bahwa jumlah responden ada 73 dan persentase menunjukkan 100%, hal ini menandakan bahwa 73 responden tersebut valid dan tidak ada responden yang masuk ke kategori Exculded.

Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha ^a	N of Items
-.235	5

Sumber: SPSS, 2022

Case *Processing Summary* di atas dapat dilihat baris Cases Valid menyatakan bahwa jumlah responden ada 73 dan persentase menunjukkan 100%, hal ini menandakan bahwa 73 responden tersebut valid dan tidak ada responden yang masuk ke kategori Exculded.

3.2.3 Hubungan implementasi otonomi khusus Papua terhadap ekonomi kerakyatan

Untuk mengetahui implementasi otonomi khusus Papua dapat meningkatkan ekonomi kerakyatan di Distrik Merauke Kabupaten Merauke maka digunakan uji statistik *Rank Spearman* (Martono, 2010)

diketahui bahwa N atau jumlah data penelitian adalah 73. Kemudian nilai sig. (2-tailed) adalah

0.012, sebagaimana dasar pengambilan keputusan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara otonomi khusus papua dengan ekonomi kerakyatan

Hubungan otonomi khusus Papua dengan ekonomi kerakyatan

Correlations

			Variabel X	Variabel Y
Spearman's rho	Variabel X	Correlation Coefficient	1.000	.294*
		Sig. (2-tailed)	.	.012
		N	73	73
	Variabel Y	Correlation Coefficient	.294*	1.000
		Sig. (2-tailed)	.012	.
		N	73	73

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber : SPSS, 2022

3.3. Implementasi otonomi khusus Papua dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan di Distrik Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua

3.3.1 Implemnetasi

Implementasi kebijakan adalah tahapan pelaksanaan keputusan diantara pembukaan suatu kebijakan, seperti halnya pasal-pasal, sebuah undang-undang legislatif, dan keluarnya keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. menurut Edward III (dalam Dyah dan Arif, 2014) terdapat 4 variabel kritis yaitu : komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Berikut adalah paparan data hasil wawancara berdasarkan ke empat variable:

1) Komunikasi

Agar Implementasi dapat dilaksanakan secara efektif, penanggung jawab implementasi sebuah keputusan harus memahami apa yang harus dilakukan. Dalam mengimplementasikan kebijakan, perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus ditransmisikan kepada personal yang tepat dan perintah harus jelas, akurat dan konsisten

2) Sumber Daya

Kebijakan implementasi agar efektif, dibutuhkan sumber daya yang cukup. Implementasi kebijakan yang tidak efektif terjadi ketika para implementor terdapat kekurangan sumber daya yang penting dalam melaksanakan kebijakan. Sumber daya yang penting untuk implementasi kebijakan terdiri dari staf dengan jumlah yang sesuai berdasarkan keahlian yang memadai dan relevan dengan implementasi kebijakan kewenangan dan fasilitas.

3) Disposisi

Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, maka kemungkinan mereka akan melakukan kebijakan seperti yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian juga dengan sebelumnya apabila sikap-sikap dan perspektif implementor berbeda dari pembuatan

keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

4) Struktur Birokrasi

Struktur yang tepat dapat memberikan dukungan kuat bagi kelancaran implementasi kebijakan. Struktur birokrasi mempunyai 1 indikator yaitu Standar Operating Procedure (SOP).

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Otonomi khusus merupakan hak istimewa bagi provinsi Papua yang diberikan dari pemerintah Pusat, dalam hal ini ketahanan NKRI merupakan salah satu hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan sehingga wilayah NKRI dapat aman dan tertib sehingga tidak mendapatkan pengaruh dari luar. Selain itu pemberian otonomi khusus guna menciptakan Papua dalam kehidupan bernegara agar penduduk di daerah tersebut tetap terjamin keamanannya (Altianua Uamang, Cakti Indra Gunawan dan Cahyo Sasmito, 2018).

Pemberian hak otonomi khusus tentunya membuat Orang Asli Papua merasakan dampak yang sangat besar jika dibandingkan sebelum adanya otonomi khusus. Pemerintah lebih memperhatikan masyarakat Papua yang dalam realitanya masih ada yang belum mendapatkan haknya, yaitu pendidikan dan kesehatan. Sehingga dengan adanya otonomi khusus menjadikan masyarakat Papua mendapatkan bantuan dan fasilitas dari pemerintah (Wiwie Iryanti, Pangkey, dan Verry Londa, 2014).

Temuan lain oleh peneliti yaitu pelaksanaan otonomi khusus Papua dalam bidang ekonomi kerakyatan ternyata masih rendah sehingga bantuan dari pemerintah ada yang belum tepat sasaran karena administrasi yang belum lengkap, sehingga penerima bantuan sulit untuk mencairkan dana bantuan tersebut dan juga dana otonomi khusus sudah dibagi tiap kabupaten sejak tahun 2022 yang tujuan utamanya untuk pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, untuk ekonomi kerakyatan masih kurang sehingga fasilitas kegiatan usaha masyarakat Papua di Kabupaten Merauke masih belum sempurna dan masih perlu diperbaiki, dan juga untuk dana bantuan harus lebih diperhatikan lagi agar semuanya mendapatkan sesuai dengan haknya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan tentang implementasi otonomi khusus Papua dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan di distrik Merauke kabupaten Merauke provinsi Papua dengan menggunakan Teori Implementasi oleh Edward III maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi otonomi khusus Papua dapat meningkatkan ekonomi kerakyatan di distrik Merauke berdasarkan hasil Penelitian dan Pembahasan bahwa pemberlakuan Otonomi khusus Papua yang ditetapkan dengan UU nomor 21 tahun 2001 dan telah diperbaharui menjadi UU No 2 Tahun 2021, telah memberikan peran yang signifikan kepada pemerintah daerah untuk perumusan kebijakan dan program pembangunan yang berpihak kepada rakyat, namun dalam implementasi masih terdapat masalah dan masih belum mencapai tujuan daripada Otonomi khusus karena masih ada masyarakat OAP yang belum merasakan keberhasilan kesejahteraan dalam Otonomi khusus yang di harapkan menjadi harapan baru bagi Papua secara keseluruhan dan khususnya di kabupaten Merauke
2. Pelaksanaan implementasi otonomi khusus Papua sudah berjalan lebih dari 20 tahun dan banyak mendapatkan perubahan terkhususnya bagi OAP yang dimana hak serta aspirasi masyarakat Papua di dengar agar terjadi kesetaraan dengan provinsi lain. Dengan teori yang digunakan bahwa pelaksanaan implementasi otonomi khusus untuk meningkatkan kesejahteraan dalam ekonomi

kerakyatan sudah dijalankan dengan diberikan dana otonomi khusus akan tetapi dana otonomi khusus sudah dibagi di tiap bidang, dan dana otonomi khusus paling utama di bidang pendidikan dan kesehatan, sedangkan ekonomi kerakyatan belum maksimal padahal untuk perekonomian sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, walaupun dana sudah diberikan tetapi dana tersebut belum cukup untuk menjalankan usaha yang dimana persaingan sudah sangat luas

Keterbatasan penelitian. Penelitian ini mempunyai keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian yaitu 14 hari, akan tetapi masih hasil penelitian sudah cukup baik namun masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian pertama tentang implemnetasi otonomi khusus di bidang ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut tentang implemntasi otonomi khsusu bidang ekonomi kerakyatan di Distrik Merauke dengan menjadikan penelitian ini sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Merauke yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, kepada Dosen Pembimbing Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin S.Sos MA dan Bapak Bagus Wahyu Hartono S.STP, MA, PhD yang telah memberikan bimbingan dalam pelaksanaan penelitian dan juga kepada IPDN yang sudah bersedia dan mendidik serta memberikan ilmu kepada penulis.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2012). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi, (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Bugin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*
- Hamdi Muchlis. (2015). *Kebijakan Publik*. Ghalia Indonesia.
- Moleong Lexi. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Kaya.
- Mubyarto. (1997). *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Indonesia*. Aditya Media.
- Mutiarin Dyah dan Zaenudin Arif. (2014). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. JKSG.
- Nazir Moh. (2011). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Purwanto, E. D. R. S. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gaya Media.
- Sangadji, Etta Mamang, S. (2010). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam penelitian*. Andi.
- Sugiyono. (2017). *Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D (Metode)*. Alfabeta.
- Tachjan. (2006). *Implementasi kebijakan publik*.

Winarno budi. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS.



